

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah yang berjudul "*Operasi Tangkap Tangan dan Pelaku Suap dan Korupsi*" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi dalam praktik suap dan korupsi, serta dampaknya terhadap masyarakat, pemerintahan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini, banyak pihak yang memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk informasi, referensi, maupun bimbingan.

Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena korupsi di Indonesia, serta memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b> .....	<b>3</b>
A. Kejadian/kisah .....	3
B. Penyebab .....	4
C. Dampak positif dan negatif dari kejadian tersebut .....	5
D. Sudut pandang .....	7
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	<b>9</b>
A. KESIMPULAN .....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang menghambat pembangunan di Indonesia. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperlemah sendi-sendi demokrasi. Salah satu bentuk korupsi yang paling sering ditemukan adalah suap, yakni pemberian atau penerimaan sesuatu dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Fenomena ini sering kali terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

OTT menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena dilakukan saat transaksi suap sedang atau baru saja dilakukan, sehingga bukti dan pelaku dapat ditangkap secara langsung. Hal ini meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dan memberikan efek jera kepada pelakulainnya. Namun demikian, kasus-kasus OTT juga menimbulkan dampak yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologi masyarakat.

Kejadian OTT yang menjerat berbagai pejabat publik, mulai dari kepala daerah hingga anggota DPR, menunjukkan betapa korupsi telah menjadi praktik yang terstruktur dan sistemik. Bahkan, tidak jarang praktik ini didukung oleh jejaring kekuasaan yang melibatkan banyak pihak. Hal ini menjadi indikator bahwa korupsi bukan sekadar masalah individu, melainkan masalah sistem yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh (Syahrudin, 2020).

Dari sudut pandang masyarakat, OTT member harapan baru terhadap tegaknya hukum. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada kenyataan pahit tentang buruknya integritas pejabat yang mereka pilih melalui mekanisme demokratis. Oleh karena itu, diskusi mengenai OTT dan pelaku suap perlu dianalisis secara mendalam, tidak hanya dari segi hukum tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan psikologis.

Penelitian dan kajian mengenai penyebab, dampak, serta persepsi masyarakat terhadap OTT menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik suap dan korupsi. Melalui makalah ini,

penulisakan mengulas lebih lanjut bagaimana OTT terjadi, faktor penyebabnya, dampaknya terhadap berbagai pihak, serta respons masyarakat terhadap fenomena tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Dimana dan bagaimana Kejadian/kisah ?
2. Apa Penyebab ?
3. Apa Dampak positif dan negatif dari kejadian tersebut ?
4. Bagaimana Sudut pandang dari pendengar, Korban, Pelaku ?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui Dimana dan bagaimana Kejadian/kisah
2. Untuk mengetahui Apa Penyebab
3. Untuk mengetahui Apa Dampak positif dan negatif dari kejadian tersebut
4. Untuk mengetahui Bagaimana Sudut pandang dari pendengar, Korban, Pelaku

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. KEJADIAN/KISAH**

Salah satu kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2022, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Ade Yasin. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total delapan orang yang diduga terlibat dalam praktik suap untuk memanipulasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

OTT ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya pengeluaran dana yang tidak sesuai prosedur dalam proses audit keuangan. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, KPK berhasil mengungkap transaksi uang tunai yang diberikan kepada beberapa auditor BPK. Ade Yasin diduga memberikan uang sejumlah lebih dari Rp1,9 miliar sebagai bentuk suap untuk memoles laporan keuangan daerahnya agar mendapatkan predikat terbaik dari BPK (Kompas, 2022).

Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik suap dalam sektor pemerintahan tidak hanya menyangkut proyek pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa OTT bukan hanya upaya represif, tetapi juga bentuk kontrol terhadap sistem yang sering kali dibajak oleh kepentingan politik dan kekuasaan.

Setelah OTT tersebut, proses hukum pun berjalan. Ade Yasin sempat menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam transaksi suap tersebut, namun fakta persidangan dan bukti yang ditemukan menunjukkan adanya peran aktif dan pengatur dari pihak pemerintah kabupaten. Kasus ini akhirnya menempatkan Ade Yasin dalam status tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Peristiwa ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kerja KPK, tetapi juga memperlihatkan bahwa korupsi telah menyusup hingga ke urusan laporan keuangan, yang semestinya menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sayangnya, laporan tersebut justru dijadikan alat tukar demi citra baik kepala daerah.

## **B. PENYEBAB**

Kasus suap dan korupsi yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Penyebabnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, antara lain:

### **1. Lemahnya Integritas Pribadi**

Banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan yang memiliki jabatan strategis dan pendidikan tinggi, tetapi integritas pribadinya rendah. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pelayanan publik sering kali tergantikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Tanpa pondasi moral yang kuat, seseorang cenderung mudah tergoda oleh peluang penyimpangan, terutama ketika ada celah dalam sistem (Prasetyo, 2019).

### **2. Budaya Koruptif dalam Birokrasi**

Korupsi tidak jarang menjadi praktik yang dianggap "wajar" di dalam institusi atau lembaga tertentu. Budaya "asal atasan senang", "yang penting aman", serta "membeli jabatan" menjadikan tindakan korupsi dan suap seakan menjadi bagian dari rutinitas birokrasi. Ketika sebuah budaya koruptif terbentuk, maka individu-individu yang masuk ke dalamnya cenderung terpengaruh atau bahkan dipaksa untuk mengikuti praktik tersebut demi mempertahankan posisi atau jabatan (Haryanto, 2020).

### **3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Salah satu penyebab utama suburnya praktik suap dan korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Ketika kontrol tidak berjalan dengan baik dan aparat penegak hukum tidak tegas, maka para pelaku merasa aman dan leluasa melakukan pelanggaran. OTT biasanya dilakukan ketika tindakan korupsi sudah berlangsung cukup lama dan aparat hukum telah mengantongi bukti yang kuat. Artinya, pengawasan pencegahan tidak berjalan secara efektif.

### **4. Tekanan Ekonomi dan Gaya Hidup Hedonisme**

Beberapa pelaku suap mengaku terdorong untuk korupsi karena tuntutan ekonomi keluarga atau gaya hidup mewah yang ingin dipenuhi. Dalam banyak kasus, pejabat atau pegawai dengan penghasilan tetap merasa tidak cukup, apalagi jika gaya hidup mereka tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Keinginan untuk memiliki kendaraan mewah, rumah besar, atau memenuhi gaya hidup konsumtif sering kali

menjadi pemicu penyimpangan.

#### **5. Celah dalam Sistem Administrasi Publik**

Sistem yang tidak transparan dan proses birokrasi yang rumit membuka peluang besar terjadinya praktik suap. Ketika seseorang harus menunggu lama, melewati berbagai meja, atau menghadapi proses yang berbelit-belit untuk memperoleh haknya, maka muncul celah suap untuk mempercepat atau mempermudah urusan. Hal ini diperparah oleh tidak adanya digitalisasi dan akuntabilitas layanan publik.

#### **6. Minimnya Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi belum diterapkan secara luas dan mendalam dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal di Indonesia. Banyak individu yang tidak memahami secara utuh dampak buruk dari tindakan korupsi, baik terhadap negara maupun masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan moral ini menyebabkan suap dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan sebagai “pelicin” untuk memperlancar urusan.

#### **7. Politik Uang dan Biaya Politik Tinggi**

Di dunia politik, biaya kampanye dan pencalonan jabatan sangat tinggi. Banyak calon kepala daerah atau pejabat legislatif yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk “membeli suara” atau membayar dukungan politik. Setelah menjabat, mereka merasa perlu “mengembalikan modal” dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui praktik suap dan penyalahgunaan anggaran.

### **C. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI KEJADIAN TERSEBUT**

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki berbagai dampak terhadap masyarakat, pemerintahan, dan pelaku yang terlibat. Dampak tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua sisi: positif dan negatif.

#### **1. Dampak Positif**

##### **a. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum**

OTT menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum masih berfungsi dan berani menindak pelaku korupsi, terlepas dari jabatannya. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa hukum masih bisa ditegakkan secara adil (KPK, 2022).

b. Memberikan Efek Jera

Tindakan OTT yang cepat dan tegas mampu menimbulkan rasa takut bagi calon pelakulainnya. Terutama karena OTT dilakukan dengan barang bukti yang kuat, sehingga sulit disangkal dan sering langsung berujung pada proses hukum yang cepat (Harian Kompas, 2022).

c. Membuka Ruang Perbaikan Sistem

Kasus OTT biasanya memunculkan audit menyeluruh dan evaluasi internal di instansi terkait. Hal ini menjadi peluang untuk memperbaiki sistem birokrasi dan mendorong penerapan transparansi dalam pemerintahan.

d. Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Bahaya Korupsi

OTT yang diekspos media secara luas membuat masyarakat lebih sadar bahwa korupsi adalah masalah nyata dan merugikan banyak pihak. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

## 2. Dampak Negatif

a. Merusak Citra Institusi Pemerintah

OTT terhadap pejabat publik, terutama kepala daerah, dapat memperburuk citra lembaga tempat mereka bekerja. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan secara umum (Nasution, 2021).

b. Ketidakstabilan Politik dan Administrasi

Penangkapan kepala daerah atau pejabat tinggi dapat menimbulkan kekosongan kepemimpinan dan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Proyek dan pelayanan publik bisa tertunda atau terganggu akibat ketidakpastian kepemimpinan.

c. Trauma Sosial bagi Keluarga Pelaku

Keluarga dan kerabat pelaku OTT seringkali mengalami tekanan sosial, stigma, dan beban psikologis akibat pemberitaan yang masif di media. Anak-anak pelaku bisa menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah atau masyarakat.

d. Menimbulkan Sikap Apatisme dan Sinisme Masyarakat

Jika OTT terusterjadinamun tidak disertai dengan reformasi sistemik dan hukuman yang tegas, masyarakat bisa menjadi apatis. Mereka merasa bahwa korupsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihapuskan, hanya berganti pelaku.

## **D. SUDUT PANDANG**

### **1. Pendengar (Masyarakat)**

Dari sudut pandang masyarakat, Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi tontonan yang dramatis sekaligus bentuk harapan. Publik melihat OTT sebagai bentuk nyata dari penegakan hukum yang transparan dan tidak pandang bulu. Namundemikian, respons masyarakat sangat beragam.

#### **a. Harapan dan Apresiasi**

Banyak masyarakat menyambut baik OTT karena menandakan adanya upaya bersih-bersih dari praktik korupsi. Publik merasa dilibatkan dalam proses penegakan keadilan, terlebih ketika informasi disampaikan secara terbuka melalui media (Kompas, 2022).

#### **b. Rasa Kecewa dan Apatis**

Sebagian masyarakat justru merasa kecewa karena OTT sering kali terjadi berulang kali tanpa adanya perubahan signifikan dalam sistem birokrasi. Hal ini memunculkan sikap apatis, yaitu keyakinan bahwa korupsi adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan.

#### **c. Dampak Sosial-Ekonomi**

Ketika pejabat daerah terkena OTT, masyarakat bisa terdampak langsung, terutama jika pembangunan atau layanan publik terganggu. Proyek infrastruktur, bantuan sosial, atau pelayanan administrasi bisa terhenti, menimbulkan ketidakpastian dan keresahan sosial.

### **2. Korban**

Dalam konteks OTT dan kasus korupsi, korban tidak hanya terbatas pada individu yang dirugikan secara langsung, tetapi juga mencakup masyarakat luas sebagai pemilih hak atas pelayanan publik yang bersih dan efektif.

#### **a. Korban Langsung**

Korban langsung bisa berupa pihak yang harus membayar suap untuk mendapatkan haknya, misalnya dalam pengurusan izin,

proyek, atau layanan publik. Mereka mengalami kerugian finansial dan sering kali tak berdaya dalam melawan sistem yang korup (Fitriani, 2020).

b. Korban Sistemik

Masyarakat umum termasuk generasi muda menjadi korban jangkapanjang karena hak-haknyasebagai warga negara terampas. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur tersedot oleh praktikuap dan korupsi.

c. Aparatur yang Jujur

Pegawai negeri atau pejabat yang masih memegang teguh integritas sering tertekandalam lingkungan yang sudah terlanjur koruptif. Mereka bisa dikucilkan, dipinggirkan dari jabatan, atau bahkan dituduh sebagai "pengkhianat" oleh rekan-rekan yang terlibat korupsi.

### 3. Pelaku

Sudut pandang pelaku dalam kasus OTT dan suap korupsi umumnya mencerminkan pembenaran, tekanan situasional, dan rasa bersalah yang muncul kemudian.

a. Pembenaran Tindakan

Banyak pelaku berusaha membenarkan tindakan mereka dengan alasan ekonomi, kebutuhan keluarga, tekanan atasan, atau "sudah menjadi kebiasaan sistem". Mereka merasa bahwa tanpa menyuap atau disuap, roda pemerintah tidak akan berjalan (Haryanto, 2020).

b. Tekanan Politik atau Institusional

Dalam banyak kasus, pelaku sebenarnya adalah bagian dari sistem yang lebih besar dan tidak memiliki pilihan selain mengikuti alur korupsi agar tetap bertahan. Mereka merasa jika tidak ikut terlibat, maka akan tersingkir dari jabatan atau posisi strategis.

c. Penyesalan dan Trauma

Setelah tertangkap dan disorot media, pelaku sering kali menunjukkan rasa penyesalan, baik secara publik maupun personal. Mereka mengalami tekanan sosial, malu terhadap keluarga, dan kehilangan reputasi serta pekerjaan. Tidak sedikit yang mengalami depresi setelah proses hukum berjalan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberadaan OTT menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki komitmen untuk menindak praktik suap dan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Dari berbagai kejadian OTT yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa praktik suap dan korupsi disebabkan oleh lemahnya integritas, tekanan sistem, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran etika dan hukum.

OTT membawa dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, memberikan efek jera, serta membuka ruang reformasi birokrasi. Namun, OTT juga menyisakan dampak negatif seperti kerusakan citra institusi, ketidakstabilan pemerintahan, dan trauma sosial baik bagi pelaku maupun masyarakat. Dari berbagai sudut pandang—masyarakat, korban, dan pelaku—dapat dipahami bahwa korupsi adalah persoalan sistemik yang menyentuh semua lapisan dan perlu ditangani secara menyeluruh, bukan hanya dengan tindakan represif, tetapi juga dengan perbaikan sistem dan penanaman nilai integritas sejak dini.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Sinergiantarsektormenjadikunciutamauntukmenciptakanpemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, L. (2020). *Korban Korupsi: Kajian Sosiologis dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(2), 145–158.
- Haryanto, B. (2020). *Korupsi Politik di Indonesia: Antara Budaya dan Sistem*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 15–29. <https://doi.org/10.22212/jip.v9i1.2045>
- Kompas. (2022, Mei 14). *OTT dan Reaksi Masyarakat: Harapan, Kekecewaan, dan Dampaknya*. Kompas.com. <https://www.kompas.com>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021*. Jakarta: KPK RI. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- Prasetyo, A. R. (2019). *Budaya Koruptif dan Upaya Pencegahan di Lembaga Pemerintahan*. Jurnal Antikorupsi Integritas, 5(1), 22–37.